



PEMARINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# RENSTRA

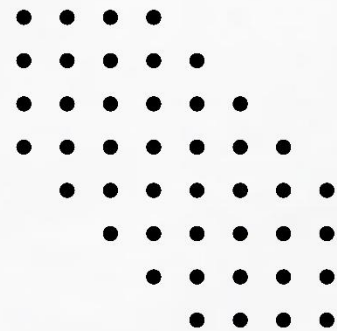
## Rencana Strategis Dinas P3ACSKB Tahun 2025-2029

### Alamat :

Jalan Pulau Belitung Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang 33149

### Website :

[www.dp3acskb.babelprov.go.id](http://www.dp3acskb.babelprov.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur, Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 telah selesai.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ini dan semoga bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, April 2026

**KEPALA DINAS**

**Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660504 199512 1 002**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5

	1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	9
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	9
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
	2.4. Tantangan dan Peluang .....	21
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DP3ACSKB PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG .....	23
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	23
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah .....	24
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia .....	26
	3.4. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia .....	30
	3.5. Telaahan Renstra BKKBN .....	31
	3.6. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	33
	3.7. Penentuan Isu-isu Strategis .....	33
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	34
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3ACSKB ...	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	36
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	39
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	39
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	62

BAB VIII PENUTUP .....	63
------------------------	----

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan, jenis kelamin dan pendidikan .....	12
Tabel 2.2	Buku Rekapitulasi Aset pada DP3ACSKB Prov. Kep. Babel .....	13
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2023 – 2024 .....	15
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2022 .....	17
Tabel 2.5	Permasalahan Pelayanan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	29
Tabel 2.6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	38
Tabel 2.8	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Pemerintah Daerah Daerah .....	41
Tabel 2.9	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	63

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan bisa melihat daerah

akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel.

Untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan aturan ini disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia juga telah menyusun dokumen perencanaan sebagaimana diatur pada peraturan diatas. Untuk perencanaan jangka panjang, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan jangka menengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017.

Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah untuk masa tahun 2025 – 2029.

Begitu juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebagai Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk masa tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis yang disusun ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



## 1.2. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 952);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 – 2029 yaitu sebagai berikut :

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2023 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota terutama berkenaan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- e. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
- f. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Strategis DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 2023-2026.
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029 yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaah RPJPD 2005 – 2025, telaah Renstra Kementerian/Lembaga terkait, dan telaah rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis untuk urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, urusan kependudukan pencatatan sipil dan urusan pengendalian penduduk keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, urusan kependudukan pencatatan sipil dan urusan pengendalian penduduk keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 – 2029.

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2025 – 2029.

### BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tindak lanjut yang strategi dan arah kebijakan yang diambil tahun 2023 – 2024.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tahun 2023 hingga tahun 2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 – 2029.

## BAB VIII PENUTUP

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Penduduk Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada 3 (tiga) urusan wajib yang menjadi kewenangan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :

- a. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- b. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- c. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun tugas dan fungsi serta organisasi DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

- A. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana.

#### B. Fungsi

DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Umum; dan
  3. Subbagian Keuangan;

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
  - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  - 2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
  - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:
  - 1. Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
  - 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
  - 3. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- e. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membawahkan:
  - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
  - 2. Seksi Pencatatan Sipil; dan
  - 3. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahkan:
  - 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
  - 2. Seksi Keluarga Sejahtera; dan
  - 3. Seksi Keluarga Berencana;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

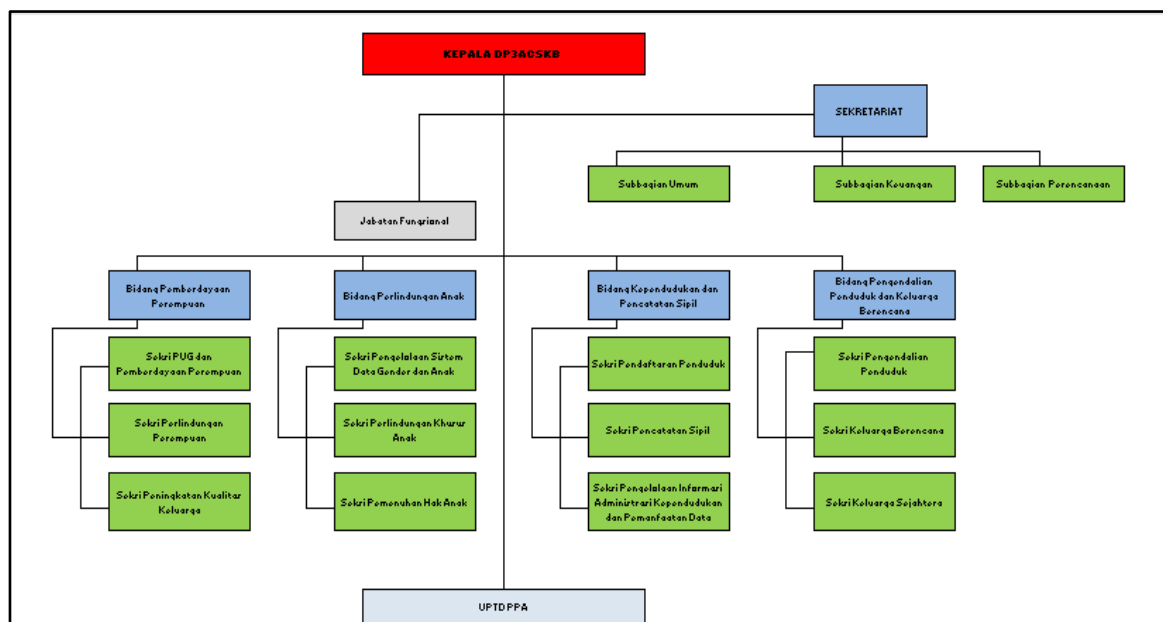
Struktur organisasi DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Kepala DP3ACSKB yang merupakan jabatan structural eselon II A;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris Dinas yang merupakan jabatan structural eselon III A;
- c. 4 (empat) orang Kepala Bidang yang merupakan jabatan structural eselon III A;
- d. 1 (satu) orang Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan jabatan structural eselon III B;
- e. 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yang merupakan jabatan structural eselon IV A;
- f. 2 (dua) orang Kepala Seksi yang merupakan jabatan structural eselon IV A;

- g. 14 (empat belas) orang sub koordinator yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon IV A; dan
- h. Jabatan Fungsional
- i. Jabatan Pelaksana

Bagan struktur organisasi DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi DP3ACSKB**



*Sumber : DP3ACSKB Prov. Kep. Babel 2022*

## 2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilengkapi dengan 58 (lima puluh delapan) orang aparatur yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) orang berstatus PNS dan 12 (dua belas) orang berstatus pegawai honorer. Dari jumlah tersebut, terdapat 32 (tiga puluh dua) orang atau 60 % laki-laki dan 26 (dua puluh enam) orang atau 40 % perempuan.

Berdasarkan pangkat dan golongan, terdapat pegawai mulai dari golongan II B hingga IV C di lingkungan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pegawai dengan pangkat / golongan III D merupakan pegawai terbanyak di DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebanyak 16 orang atau 27,59 % dari total seluruh pegawai.

Jika dilihat dari latar belakang Pendidikan, terdapat 3,45% pegawai yang berpendidikan S3, 15,52 % pegawai berpendidikan S2, 48,48 % pegawai berpendidikan S1, dan yang lainnya (32,75%) berpendidikan D3 kebawah. Tabel berikut menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan, jenis kelamin dan tingkat Pendidikan :

**Tabel 2.1.**

**Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan, jenis kelamin dan pendidikan**

No	Pangkat/Gol	Tingkat Pendidikan										Total			%
		S3		S2		S1		D3		SMA		L	P	Jml	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1	Pembina Utama Muda / IV C	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1,72%
2	Pembina Utama Tk. 1 / IV B	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5,17%
3	Pembina / IV A	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	5	-	5	8,62%
4	Penata Tk. I / III D	-	-	1	1	6	7	-	1	-	-	7	9	16	27,59%
5	Penata / III C	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	2	3	5	8,62%
6	Penata Muda Tk. I / III B	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	5	2	7	12,07%
7	Penata Muda / III A	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	1	3	5,17%
8	Pengatur Tk. I / II D	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3,45%
9	Pengatur / II C	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	5,17%
10	Pengatur Muda Tk. I/II B	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1,72%
11	Pengatur Muda / II A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Honoror	-	-	-	-	1	2	-	1	6	2	7	5	12	20,69%

No	Pangkat/Gol	Tingkat Pendidikan										Total			%
		S3		S2		S1		D3		SMA		L	P	Jml	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
TOTAL		2	-	5	4	16	12	2	4	10	3	35	23	58	
Persentase		3,45 %		15,52 %		48,28%		10,34 %		22,41%		60%	40%		

Sumber : DP3ACSKB Prov. Kep. Babel Tahun 2022

Dari segi sumber daya sarana dan prasarana, saat ini DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati perkantoran yang beralamat di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Air Itam Pangkalpinang. Ruang kantor ini sebelumnya merupakan Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga harus dilakukan rehabilitasi dan renovasi serta dilakukan penambahan ruang/gedung agar layak sebagai ruang kerja pegawai. Untuk kelengkapan kerja pegawai ditunjang oleh peralatan kerja berupa komputer, printer, mesin fotocopy, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional serta peralatan penunjang lainnya.

Tabel berikut menunjukkan aset tetap yang dimiliki oleh DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

**Tabel 2.2.**

**Buku Rekapitulasi Aset pada DP3ACSKB Prov. Kep. Babel**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>6.057.071.900,00</b>
<b>1</b>	<b>TANAH</b>	0,00
1.01	TANAH	0,00
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>2.372.439.500,00</b>
2.01	ALAT BESAR	0,00

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.139.582.000,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	596.395.000,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	25.945.000,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	0,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	610.517.500,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PANGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU-RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAHRAGA	0,00
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>3.684.632.400,00</b>
3.01	BANGUNAN GEDUNG	3.659.632.400,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	25.000.000,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
<b>4</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>0,00</b>
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>0,00</b>
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
<b>6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>81.962.500,00</b>
<b>2</b>	<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>	<b>0,00</b>
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
<b>3</b>	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>0,00</b>
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
<b>4</b>	<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0,00</b>
4.01	ASET LAIN-LAIN	81.962.500,00

Sumber : DP3ACSKB Prov. Kep. Babel 2022

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	SATUAN	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					KETERANGAN
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai				74	74				74	74				100	100	
2	Persentase perempuan bekerja dalam peningkatan ekonomi keluarga	Persen				13,84	14,01				13,33	92,57				96,32	660,74	
3	Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	Persen				51,71	51,72				53,53	54,10				103,52	104,60	
4	Persentase OPD yang melaksanakan PUG	Persen				51,85	59,26				62,9	100				121,31	168,75	
5	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen				100	100				100	100				100	100	
6	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	Persen				100	100				100	100				100	100	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	SATUAN	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					KETERANGAN
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
7	Persentase Kab/Kota yang memenuhi kategori layak anak	Persen				42,85	100				85,71	100				200,02	100	
8	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persen				77,00	81,08				85,27	87,27				110,74	107,63	
9	Persentase Pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Persen				68,92	72,98				72,58	77,42				105,31	106,08	
10	Persentase Peserta KB aktif	Persen				69,6	70,3				66,9	74,38				96,12	105,80	
11	Persentase penurunan Keluarga Prasejahtera	Persen				6,35	6,25				0,92	0,91				185,51	185,44	

**Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2022**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				9.391,94	9.406,60				8.217,20	8.168,26				0,87	0,87	3.760	3.277
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				91,44	49,71				75,87	39,87				0,83	0,80	28	23
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				253,69	308,20				143,92	168,18				0,57	0,55	112	62
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				323,25	198,88				274,87	181,71				0,85	0,91	104	91

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				0,00	22,92				0,00	22,11				0,00	0,96	5	4
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK				113,49	248,62				89,44	223,20				0,79	0,90	72	63
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				148,93	316,40				69,87	151,57				0,47	0,48	93	44
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				32,09	399,19				31,80	329,21				0,99	0,82	86	72
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				400,00	0,00				393,80	0,00				0,98	0,00	80	79
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>				55,04	35,45				45,71	29,61				0,83	0,84	18	15
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				43,53	23,77				27,50	17,80				0,63	0,75	13	9
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>				171,41	78,70				126,22	64,80				0,74	0,82	50	38
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				210,77	249,03				160,39	200,34				0,76	0,80	92	72

Pada periode 2021-2022 terdapat 11 indikator yang harus dicapai oleh Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yaitu:

1. Nilai RB Perangkat Daerah
2. Persentase perempuan bekerja dalam peningkatan ekonomi keluarga
3. Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
4. Persentase OPD yang melaksanakan PUG
5. Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.
6. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif
7. Persentase Kab/Kota yang memenuhi kategori layak anak
8. Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
9. Presentase Pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan
10. Persentase Peserta KB aktif
11. Persentase penurunan Keluarga Prasejahtera

Dari sebelas indikator tersebut, capaian kinerja yang dihasilkan diatas angka 96%. Hanya dua indikator yang mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu Persentase perempuan bekerja dalam peningkatan ekonomi keluarga dan Persentase Peserta KB aktif. Secara keseluruhan pada periode 2021- 2022 DP3ACSKB meraih predikat kinerja sangat tinggi. Pada tahun 2021 meraih rata rata kinerja sebesar 108,27 % dan tahun 2022 sebesar 106,21%.

Dilihat dari sisi anggaran, secara umum Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mampu menyelesaikan seluruh anggaran yang diamanahkan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah, walaupun ada beberapa program dilaksanakan tanpa anggaran antara lain program pengelolaan sistem data gender dan anak, program pencatatan sipil dan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Sedangkan rasio realisasi anggaran mayoritas realisasi rencana anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada periode 2021-2022 berada pada kisaran rerata 70%-90%. Permasalahan pada realisasi anggaran ini adalah berubahnya prioritas pembangunan kepala daerah pada RKPD, sehingga anggaran belanja difokuskan pada penanganan dan pemulihan wabah *COVID-19*.

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

Dari penjabaran capaian program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahun 2023 dapat dianalisis berbagai tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh Dina P3ACSKB dalam lima tahun ke depan.

Salah satu kondisi yang akan membawa perubahan secara sosioteknologi yaitu berubahnya perilaku anak dan remaja akibat derasnya informasi dan komunikasi yang berhubungan langsung dengan moralitas dan kehidupan sosial hal ini akan mempengaruhi sosiokultural lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut adalah penjabaran berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh DP3ACSKB.

##### **Tantangan:**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan teknologi jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan baru terhadap kondisi sosial dan moral pada remaja dan anak-anak.
- b. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- c. Perspektif kesetaraan gender belum menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan di berbagai OPD, sehingga banyak kebijakan yang disusun belum mampu melayani kebutuhan masyarakat secara inklusif.
- d. Belum adanya peraturan daerah yang secara spesifik menyoal kasus-kasus anak-anak yang bermasalah dengan hukum sehingga upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi masih terhambat.

- e. Masih rendahnya kemampuan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengakses kesempatan mengembangkan diri pada bidang ekonomi dan politik.
- f. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis dan budaya sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- g. Tingkat migrasi yang cukup tinggi di Bangka Belitung menyebabkan persoalan pengendalian penduduk menjadi cukup sulit untuk diatasi
- h. Masih rendahnya penggunaan MKJP di masyarakat karena pemahaman yang keliru tentang metode tersebut.
- i. Meningkatnya kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi pada remaja, seperti kehamilan tidak diinginkan dan pernikahan remaja dibawah umur.
- j. Ketimpangan pembangunan yang cukup signifikan antar wilayah.
- k. Jaringan menjadi komponen yang sangat berpengaruh terhadap proses penerbitan berkas kependudukan maupun pencatatan sipil.
- l. Masyarakat masih banyak yang belum familiar atau mengenal pelayanan online kependudukan maupun pencatatan sipil.

**Peluang:**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai lembaga non- pemerintahan dan akademik.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah untuk bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi bekerjasama dalam usaha memelihara dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak.
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Total Fertility Rate (TFR) Bangka Belitung yang berada pada angka 2.49 menjadikan tingkat pertumbuhan penduduk sudah pada kondisi yang masih aman dan patut ditingkatkan lagi menjadi pertumbuhan penduduk yang lebih sehat dan ideal.
- h. Akses kepada fasilitas kesehatan di Bangka Belitung yang sudah cukup merata sehingga masyarakat cukup mudah mengakses pelayanan kesehatan reproduksi dan KB.
- i. Kegiatan sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak menggunakan berbagai platform media, baik media tatap muka, media cetak dan media sosial atau online.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DP3ACSKB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan

- 1) Kualitas pelayanan informasi publik yang belum sesuai dengan standar;
- 2) Pemanfaatan SDM di perangkat daerah belum sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki;
- 3) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
- 4) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan:

- 1) Pelaksanaan PPRG belum terinternalisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
- 2) Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam legislatif;
- 3) Masih rendahnya partisipasi perempuan/jumlah perempuan sebagai pejabat publik, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah provinsi;
- 4) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;
- 5) Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 6) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

c. Permasalahan Bidang Perlindungan Anak :

- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap anak;
- 2) Usaha pencegahan dan penanganan kasus TPPO masih belum terkoordinasi dengan baik;

- 3) Pelayanan terhadap korban kasus kekerasan pada anak yang belum maksimal.
  - 4) Supervisi pada pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum mampu meningkatkan tingkat/level Kabupaten/Kota layak Anak.
  - 5) Sulitnya mendeteksi kasus penelantaran pada anak.
  - 6) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
  - 7) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- d. Permasalahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
- 1) Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum maksimal;
  - 2) Kurangnya fasilitasi pendaftaran penduduk dan Pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur dukcapil.
  - 3) Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dengan OPD provinsi dan sektor lainnya.
  - 4) Kualitas data agregat dan profil kependudukan skala provinsi.
- d. Permasalahan terkait Bidang Keluarga Berencana:
- 1) Belum terbentuknya fungsi lembaga konseling keluarga di masyarakat;
  - 2) Menurunnya fungsi pengawasan dan perlindungan dalam keluarga;
  - 3) Semakin renggangnya pola relasi di dalam keluarga dan masyarakat dari akibat perkembangan teknologi informasi ;
  - 4) Meningkatnya permasalahan psikososial pada remaja, terlihat dengan meingkatnya kasus kenakalan remaja, pernikahan usia dini, dan kehamilan tidak diinginkan;
  - 5) Kegiatan kelompok bina keluarga sejahtera yang belum berjalan dengan baik;
  - 6) Aktifitas dan tata kelola Kampung keluarga berkualitas yang terbentuk masih rendah.

### **3.1. TELAAHAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Visi pembangunan dalam RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera”

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pencapaian visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut di atas akan dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan berikut ini:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imtaq.
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil.
4. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang

Dari lima Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada misi ke-2 (dua), “Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imtaq” dengan tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, kemudian tujuan ini di bagi menjadi beberapa sasaran Dinas P3ACSKB yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB) dengan Indikator Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)
2. Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dengan Indikator Indeks Pemberdayaan gender (IDG)
3. Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak dengan Indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
4. Meningkatnya perlindungan khusus anak dengan Indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
5. Menurunnya Angka Kelahiran Total dengan Indikator Total Fertility Rate (TFR)
6. Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan dengan Indikator Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan

### **3.2. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu “Kemen PPPA yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Selanjutnya Misi Kemen PPPA adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
5. mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu; dan
6. meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGPHPA

Perumusan tujuan Kemen PPPA mendasarkan pada RPJMN Tahun 2020- 2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “Perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak; dan
2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

2.4. Sasaran Strategis Kemen PPPA Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Sasaran Strategis Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan
- d. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- e. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP);
- f. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA);
- g. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif; dan
- h. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA).

**Tabel 2.5**

**Permasalahan Pelayanan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta  
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>• IDG masih rendah dibandingkan kondisi ideal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> <li>• Peningkatan ekonomi perempuan masih sangat kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui UPTD PPA dan lembaga P2TP2A kabupaten/kota</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak</li> </ul>
		Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, hidup sehat, gizi yang baik, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan tujuan dan sasaran terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, dengan sasaran Terjaminnya hak-hak

keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kualitas pelayanan kabupaten/kota dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan</li> <li>Letak geografis wilayah yang jauh dari pusat pelayanan</li> <li>Minimnya Sarana dan prasana</li> <li>Terbatasnya SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah ada SIAK</li> <li>Adanya koordinasi yang baik antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota</li> <li>Adanya revisi UU tentang administrasi kependudukan</li> <li>KTP digital</li> </ul>
		Belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya SDM</li> <li>Belum optimalnya ketersediaan data profil kependudukan</li> <li>Kebutuhan pemanfaatan database kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya SIAK</li> <li>Adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan database kependudukan</li> </ul>

### 3.4. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tertuang di dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.

Arah Kebijakan dan Strategi pada Rancangan RPJMN 2020-2024 adalah dalam upaya “Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi”.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per-1.000 kelahiran pada 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”. LPP diupaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya TFR per WUS (15-49 thn) sebesar 2.6%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya jumlah peserta KB aktif</li> <li>Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan KB</li> <li>Tidak meratanya sebaran PLKB di beberapa wilayah di Bangka Belitung</li> <li>Derasnya informasi menyesatkan di masyarakat melalui sosial media tentang kontrasepsi.</li> <li>Meningkatnya jumlah pengguna KB alami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas kesehatan yang relatif merata dan mudah dijangkau</li> <li>Jumlah PLKB yang telah terlatih mencapai 88%</li> <li>Kepedulian pemerintah daerah terhadap program KB/KS</li> <li>Semakin mudahnya akses informasi tentang kontrasepsi</li> </ul>
2.	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang signifikannya kenaikan contraceptive prevalence rate (CPR) atau cakupan KB aktif</li> </ul>		
3.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih Tingginya UnmetNeed Bangka Belitung sebesar 12%</li> </ul>		
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya upaya pendewasaan usia pernikahan</li> </ul>		
5.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya Peran keluarga dalam menekan laju pertumbuhan penduduk</li> </ul>		
6.	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun sebesar 20,3</li> </ul>		

### 3.5. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama empat tahun kedepan (2025 – 2029) tidak merencanakan program dan kegiatan pembangunan fisik skala besar yang memiliki dampak terhadap pemanfaatan ruang serta dampak lingkungan hidup sehingga tidak dilakukan telaah rinci tentang dampak program dan kegiatan terhadap tata ruang dan lingkungan hidup.

### **3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil analisis ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja;
2. Masih lebarnya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan;
3. Masih belum terpenuhinya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak;
4. Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum, tentang hak anak dan tindak kekerasan terhadap anak;
5. maraknya kasus kekerasan terhadap anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang masih ada;
6. kurangnya komitmen baik dari instansi pemerintah maupun swasta terhadap Kab/Kota Layak Anak;
7. Belum aktifnya semua Forum Anak baik ditingkat provinsi maupun kab/kota;
8. Kurangnya data pendukung, akibat dari belum seluruh Perangkat daerah memiliki data terpilah;
9. Belum Optimalnya peran keluarga mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DP3ACSKB)
2. Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
3. Meningkatnya Kesejahteraan Anak
4. Meningkatkan Peran keluarga dalam menekan laju pertumbuhan penduduk

Selanjutnya pernyataan Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.6**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,12	89,15	89,23	89,34
		Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	53,4	54	54,33	54,67

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				1	2	3	4
2	Meningkatnya Kesejahteraan Anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,05	72,06	72,07	72,08
		Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	66,07	66,87	67,67	68,47
		Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	73,24	73,94	74,64	75,34
3	Meningkatkan Peran keluarga dalam menekan laju pertumbuhan penduduk		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	57,5	58	58,5	59,1
		Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	2,4	2,37	2,32	2,3
		Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	76,37	79,11	81,85	84,58

## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tentunya dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam empat tahun mendatang.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DP3ACSKB yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara DP3ACSKB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3ACSKB. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tabel dibawah ini disajikan rumusan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrai Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam empat tahun mendatang.

**Tabel 2.7.**

### Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Isu Strategis :	Belum optimalnya Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak		
Misi :	Meningkatkan SDM yang berkualitas, berdaya dan berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Layanan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Efektif dan Efisien serta Keluarga Berkualitas.	1. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak.	1. Meningkatkan kualitas dan efektifitas SDM dalam menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Pengintegrasian isu gender dalam proses perencanaan dan anggaran melalui Anggaran yang Responsif Gender (ARG)
		2. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan	2. Peningkatan advokasi dan keterampilan perempuan guna mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan dalam perekonomian.
		3. Mengendalikan jumlah kekerasan terhadap perempuan	3. Peningkatan perlindungan perempuan melalui upaya kerjasama, pencegahan dan penguatan SDM serta pelayanan KtP secara komprehensif.

		4. Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	4. Peningkatan Advokasi, sosialisasi dan kerjasama dalam upaya Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak.
		5. Meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak	5. Peningkatan ketersediaan Data pilah Gender dan Anak pada perangkat daerah provinsi
		6. Meningkatkan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	6. Peningkatan Advokasi, sosialisai dan KIE serta pemenuhan hak anak.
		7. Meningkatkan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	7. Peningkatan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan KtA secara komprehensif

Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

Isu Strategis :	Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		
Misi :	Meningkatkan SDM yang berkualitas, berdaya dan berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. 1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Layanan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Efektif dan Efisien serta Keluarga Berkualitas.	1. Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan	1. Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1. Peningkatan Fasilitas, supervisi dan Pemberian Konsultasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil guna meningkatkan kepemilikan Identitas dan akta Kependudukan.
		2. Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	2. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan dan pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan
		3. Meningkatnya kualitas profil kependudukan	3. Peningkatan Penyediaan dan penyajian data Kependudukan sekala Provinsi yang berkualitas.

Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Isu Strategis :	Belum optimalnya pembangunan Keluarga yang berkualitas		
Misi :	Meningkatkan SDM yang berkualitas, berdaya dan berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Layanan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Efektif dan Efisien serta Keluarga Berkualitas.	1. Meningkatnya Pembangunan Keluarga	1. Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	1. Peningkatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Jalur Nonformal dan Informal
		2. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	2. Peningkatan penggunaan Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) dan kebutuhan ber-KB pada pasangan usia subur yang tidak terpenuhi (unmet need)
		3. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan	3. Peningkatan advokasi sosialisasi dan KIE kepada Remaja dan Keluarga yang

		keluarga sejahtera (KS)	Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga
--	--	-------------------------	--

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF****6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian  
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang ada di DP3ACSKB merupakan program prioritas yang ada di RPJMD 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP3ACSKB. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Tabel 2.8

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Pemerintah Daerah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11.955.393.628		12.245.716.348		12.373.933.908		12.504.074.731		12.636.167.667		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah			9.942.993.844		10.233.316.564		10.361.534.124		10.491.674.947		10.623.767.883		
2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				83.759.700		83.759.700		83.759.700		83.759.700		83.759.700		
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	34.700.000	7	34.700.000	7	34.700.000	7	34.700.000	7	34.700.000		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	46.059.700	2	46.059.700	2	46.059.700	2	46.059.700	2	46.059.700		
2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				46.059.700		46.059.700		46.059.700		46.059.700		46.059.700		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	46.059.700	2	46.059.700	2	46.059.700	2	46.059.700	2	46.059.700		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34.700.000		34.700.000		34.700.000		34.700.000		34.700.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	34.700.000	7	34.700.000	7	34.700.000	7	34.700.000	7	34.700.000		
2.08.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000		
2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.562.318.044		8.852.640.764		8.930.858.324		9.110.999.147		9.243.092.083		
Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	60	8.560.318.044	60	8.850.640.764	60	8.928.858.324	60	9.108.999.147	60	9.241.092.083		
2.08.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.560.318.044		8.850.640.764		8.928.858.324		9.108.999.147		9.241.092.083		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	60	8.560.318.044	60	8.850.640.764	60	8.928.858.324	60	9.108.999.147	60	9.241.092.083		
2.08.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000		
2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
2.08.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000		
2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000		
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				369.578.600		369.578.600		369.578.600		369.578.600		369.578.600		
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	369.578.600	2	369.578.600	2	369.578.600	2	369.578.600	2	369.578.600		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				10.979.500		10.979.500		10.979.500		10.979.500		10.979.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	10.979.500	1	10.979.500	1	10.979.500	1	10.979.500	1	10.979.500			
2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000			
2.08.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000			
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12.600.000	12	12.600.000	12	12.600.000	12	12.600.000	12	12.600.000			
2.08.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				153.999.100		153.999.100		153.999.100		153.999.100		153.999.100			
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	2	153.999.100	2	153.999.100	2	153.999.100	2	153.999.100	2	153.999.100			
2.08.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000			
2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				142.000.000		142.000.000		142.000.000		142.000.000		142.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	6	142.000.000	6	142.000.000	6	142.000.000	6	142.000.000	6	142.000.000		
2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				582.700.000		582.700.000		582.700.000		582.700.000		582.700.000		
Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	582.700.000		582.700.000	12	582.700.000	12	582.700.000	12	582.700.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				168.000.000		168.000.000		168.000.000		168.000.000		168.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	168.000.000		168.000.000	12	168.000.000	12	168.000.000	12	168.000.000		
2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				414.700.000		414.700.000		414.700.000		414.700.000		414.700.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	414.700.000	12	414.700.000	12	414.700.000	12	414.700.000	12	414.700.000		
2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				272.359.500		272.359.500		322.359.500		272.359.500		272.359.500		
Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	272.359.500	2	272.359.500	2	322.359.500	2	272.359.500	2	272.359.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	yang Dipelihara/Direhabilitasi														
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8		8		8		8		8				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	82		82		82		82		82				
2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				56.400.000		56.400.000		56.400.000		56.400.000		56.400.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	2	56.400.000	2	56.400.000	2	56.400.000	2	56.400.000	2	56.400.000			
2.08.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				123.939.500		123.939.500		123.939.500		123.939.500		123.939.500			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	123.939.500	8	123.939.500	8	123.939.500	8	123.939.500	8	123.939.500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.020.000		42.020.000		42.020.000		42.020.000		42.020.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	82	42.020.000	82	42.020.000	82	42.020.000	82	42.020.000	82	42.020.000		
2.08.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		100.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif Dan Efisien	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	75	78	33.278.000	79	33.278.000	80	33.278.000	81	33.278.000	82	33.278.000	2.08.2.12.2.14.01.0001 - UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROV.KEP. BANGKA BELITUNG	
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 3. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			17.678.000		17.678.000		17.678.000		17.678.000		17.678.000		
2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			2.178.000		2.178.000		2.178.000		2.178.000		2.178.000		
2.08.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			15.600.000		15.600.000		15.600.000		15.600.000		15.600.000		
2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			15.600.000		15.600.000		15.600.000		15.600.000		15.600.000		
<b>2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				<b>237.940.408</b>		<b>237.940.408</b>		<b>237.940.408</b>		<b>237.940.408</b>		<b>237.940.408</b>		
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	50.57	51.07	237.940.408	51.32	237.940.408	51.57	237.940.408	51.80	237.940.408	52.07	237.940.408	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	20.48	7		8		9		10		11			
2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender				158.626.938		158.626.938		158.626.938		158.626.938		158.626.938		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi															
Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	33	33	158.626.938	33	158.626.938	33	158.626.938	33	158.626.938	33	158.626.938			
	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	62	62		62		62		62		62				
2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				79.313.469		79.313.469		79.313.469		79.313.469		79.313.469			
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	62	62	79.313.469	62	79.313.469	62	79.313.469	62	79.313.469	62	79.313.469			
2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				79.313.469		79.313.469		79.313.469		79.313.469		79.313.469			
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	33	33	79.313.469	33	79.313.469	33	79.313.469	33	79.313.469	33	79.313.469			
2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi				79.313.470		79.313.470		79.313.470		79.313.470		79.313.470			
Jumlah Dokumen Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50	50	79.313.470	50	79.313.470	50	79.313.470	50	79.313.470	50	79.313.470			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.1.02.0009 - peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				79.313.470		79.313.470		79.313.470		79.313.470		79.313.470		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50	1400	79.313.470	1400	79.313.470	1400	79.313.470	1400	79.313.470	1400	79.313.470		
<b>2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				296.799.280		296.799.280		296.799.280		296.799.280		296.799.280		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	20.27:20.54	18.95:19.14	146.799.280	17.79:18.42	146.799.280	16.44:17.76	146.799.280	15.09:17.09	146.799.280	14.82:16.43	146.799.280	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	
2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				112.289.280		112.289.280		112.289.280		112.289.280		112.289.280		
Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Provinsi	2	2	112.289.280	2	112.289.280	2	112.289.280	2	112.289.280	2	112.289.280		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1	1		1		1		1		1			
2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				83.920.115		83.920.115		83.920.115		83.920.115		83.920.115		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	2	2	83.920.115	2	83.920.115	2	83.920.115	2	83.920.115	2	83.920.115		
2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				28.369.165		28.369.165		28.369.165		28.369.165		28.369.165		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1	1	28.369.165	1	28.369.165	1	28.369.165	1	28.369.165	1	28.369.165		
2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				34.510.000		34.510.000		34.510.000		34.510.000		34.510.000		
Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	55	55	34.510.000	55	34.510.000	55	34.510.000	55	34.510.000	55	34.510.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				34.510.000		34.510.000		34.510.000		34.510.000		34.510.000		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan bimtek	55	55	34.510.000	55	34.510.000	55	34.510.000	55	34.510.000	55	34.510.000		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan (upt ppa)	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	2.08.2.12.2.14.01.0001 - UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROV.KEP. BANGKA BELITUNG	
2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Jumlah Dokumen Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22	22	150.000.000	22	150.000.000	22	150.000.000	22	150.000.000	22	150.000.000		
2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22	22	150.000.000	22	150.000.000	22	150.000.000	22	150.000.000	22	150.000.000			
<b>2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				388.228.096		388.228.096		388.228.096		388.228.096		388.228.096			
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	2	3	388.228.096	3	388.228.096	4	388.228.096	4	388.228.096	4	388.228.096	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA		
2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				254.501.250		254.501.250		254.501.250		254.501.250		254.501.250			
Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2	2	254.501.250	2	254.501.250	2	254.501.250	2	254.501.250	2	254.501.250			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan	2	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
2.08.04.1.01.0005 - penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				191.511.121		191.511.121		191.511.121		191.511.121		191.511.121			
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2	2	191.511.121	2	191.511.121	2	191.511.121	2	191.511.121	2	191.511.121			
2.08.04.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				62.990.129		62.990.129		62.990.129		62.990.129		62.990.129			
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2	2	62.990.129	2	62.990.129	2	62.990.129	2	62.990.129	2	62.990.129			
2.08.04.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				133.726.846		133.726.846		133.726.846		133.726.846		133.726.846			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2	2	133.726.846	2	133.726.846	2	133.726.846	2	133.726.846	2	133.726.846		
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	50	50		50		50		50		50			
2.08.04.1.02.0006 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				66.750.000		66.750.000		66.750.000		66.750.000		66.750.000		
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	50	50	66.750.000	50	66.750.000	50	66.750.000	50	66.750.000	50	66.750.000		
2.08.04.1.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				66.976.846		66.976.846		66.976.846		66.976.846		66.976.846		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2	2	66.976.846	2	66.976.846	2	66.976.846	2	66.976.846	2	66.976.846		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM				44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
DATA GENDER DAN ANAK															
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	11,76	11,76	44.000.000	11,76	44.000.000	11,76	44.000.000	11,76	44.000.000	11,76	44.000.000	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA		
2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000			
Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000			
2.08.05.1.01.0005 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi				44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000			
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000			
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				648.500.000		648.500.000		648.500.000		648.500.000		648.500.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60.89	62	648.500.000	63	648.500.000	64	648.500.000	65	648.500.000	66	648.500.000	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	
2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				77.500.000		77.500.000		77.500.000		77.500.000		77.500.000		
Jumlah Dokumen Pelembagaan PHA	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50	50	77.500.000	50	77.500.000	50	77.500.000	50	77.500.000	50	77.500.000		
2.08.06.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				77.500.000		77.500.000		77.500.000		77.500.000		77.500.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50	50	77.500.000	50	77.500.000	50	77.500.000	50	77.500.000	50	77.500.000		
2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia				571.000.000		571.000.000		571.000.000		571.000.000		571.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi															
Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	50	50	571.000.000	50	571.000.000	50	571.000.000	50	571.000.000	50	571.000.000			
	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1	1		1		1		1		1				
2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak				395.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000			
Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1	1	395.000.000	1	395.000.000	1	395.000.000	1	395.000.000	1	395.000.000			
2.08.06.1.02.0008 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				176.000.000		176.000.000		176.000.000		176.000.000		176.000.000			
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	50	50	176.000.000	50	176.000.000	50	176.000.000	50	176.000.000	50	176.000.000			
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				396.932.000		396.932.000		396.932.000		396.932.000		396.932.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79.05	79.20	166.710.000	79.50	166.710.000	79.65	166.710.000	79.80	166.710.000	79.90	166.710.000	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	
2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				152.010.000		152.010.000		152.010.000		152.010.000		152.010.000		
Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	32	30	152.010.000	30	152.010.000	50	152.010.000	50	152.010.000	50	152.010.000		
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	70	70		70		70		70		70			
2.08.07.1.01.0006 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				34.510.000		34.510.000		34.510.000		34.510.000		34.510.000		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	50	50	34.510.000	50	34.510.000	50	34.510.000	50	34.510.000	50	34.510.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				66.750.000		66.750.000		66.750.000		66.750.000		66.750.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	70	70	66.750.000	70	66.750.000	70	66.750.000	70	66.750.000	70	66.750.000		
2.08.07.1.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				50.750.000		50.750.000		50.750.000		50.750.000		50.750.000		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1	1	50.750.000	1	50.750.000	1	50.750.000	1	50.750.000	1	50.750.000		
2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				14.700.000		14.700.000		14.700.000		14.700.000		14.700.000		
Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	1	14.700.000	1	14.700.000	1	14.700.000	1	14.700.000	1	14.700.000		
2.08.07.1.03.0009 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				14.700.000		14.700.000		14.700.000		14.700.000		14.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	1	14.700.000	1	14.700.000	1	14.700.000	1	14.700.000	1	14.700.000		
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79.05	79.2	230.222.000	79.5	230.222.000	79.65	230.222.000	79.8	230.222.000	79.9	230.222.000	2.08.2.12.2.14.01.0001 - UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROV.KEP. BANGKA BELITUNG	
2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				230.222.000		230.222.000		230.222.000		230.222.000		230.222.000		
Jumlah Dokumen Layanan Bagi Anak	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	3	230.222.000	3	230.222.000	3	230.222.000	3	230.222.000	3	230.222.000		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi	8	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2	2		2		2		2		2			
2.08.07.1.02.0009 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	5	5.500.000	5	5.500.000	5	5.500.000	5	5.500.000	5	5.500.000		
2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				184.722.000		184.722.000		184.722.000		184.722.000		184.722.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8	8	184.722.000	8	184.722.000	8	184.722.000	8	184.722.000	8	184.722.000		
2.08.07.1.02.0011 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000		
2.08.07.1.02.0015 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				945.300.000		945.300.000		945.300.000		945.300.000		945.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				351.000.000		351.000.000		351.000.000		351.000.000		351.000.000		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	4.44	4.60	351.000.000	4.70	351.000.000	4.80	351.000.000	4.90	351.000.000	5.00	351.000.000	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	73.73	80.00		85.00		90.00		95		100			
2.12.02.1.01 - Pelayanan Pendaftaran Kependudukan				92.000.000		92.000.000		92.000.000		92.000.000		92.000.000		
Persentase kab/kota yang mendapatkan supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1	1	92.000.000	1	92.000.000	1	92.000.000	1	92.000.000	1	92.000.000		
	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1	1		1		1		1		1			
2.12.02.1.01.0002 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi													
2.12.02.1.01.0004 - Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				47.000.000		47.000.000		47.000.000		47.000.000		47.000.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000		
2.12.02.1.02 - Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				168.000.000		168.000.000		168.000.000		168.000.000		168.000.000		
1) Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK); 2) Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3) Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1	1	168.000.000	1	168.000.000	1	168.000.000	1	168.000.000	1	168.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1	1		1		1		1		1			
2.12.02.1.02.0001 - Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk				147.000.000		147.000.000		147.000.000		147.000.000		147.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1	1	147.000.000	1	147.000.000	1	147.000.000	1	147.000.000	1	147.000.000		
2.12.02.1.02.0005 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		
Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				91.000.000		91.000.000		91.000.000		91.000.000		91.000.000		
Persentase kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	91.000.000	1	91.000.000	1	91.000.000	1	91.000.000	1	91.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	1		1		1		1		1			
2.12.02.1.03.0001 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000		
2.12.02.1.03.0002 - Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk				52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				319.800.000		319.800.000		319.800.000		319.800.000		319.800.000		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	71.29	72.50	319.800.000	74.50	319.800.000	76.50	319.800.000	78.50	319.800.000	80.50	319.800.000	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	71.14	72.50		74.50		76.50		78.50		80.50			
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	64.50	65.50		66.00		66.50		67.00		67.50			
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	99.65	99.50		99.55.00		99.60		99.65		99.70			
2.12.03.1.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				64.800.000		64.800.000		64.800.000		64.800.000		64.800.000		
Persentase kab/kota yang mendapatkan supervisi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1	1	64.800.000	1	64.800.000	1	64.800.000	1	64.800.000	1	64.800.000		
2.12.03.1.01.0004 - Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				64.800.000		64.800.000		64.800.000		64.800.000		64.800.000		
Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1	1	64.800.000	1	64.800.000	1	64.800.000	1	64.800.000	1	64.800.000		
2.12.03.1.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi				152.000.000		152.000.000		152.000.000		152.000.000		152.000.000		
1) Persentase Cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-4 tahun; 2) Persentase Cakupan Akta Cerai; 3) Persentase Cakupan Akta Perkawinan; 4) Persentase Cakupan Akta Kematian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	1	1	152.000.000	1	152.000.000	1	152.000.000	1	152.000.000	1	152.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil													
2.12.03.1.02.0001 - Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil				83.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	1	83.000.000	1	83.000.000	1	83.000.000	1	83.000.000	1	83.000.000		
2.12.03.1.02.0004 - Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.12.03.1.02.0005 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		
Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000		
2.12.03.1.03 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				103.000.000		103.000.000		103.000.000		103.000.000		103.000.000		
Persentase kab/kota yang mendapatkan Konsultasi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	1	103.000.000	1	103.000.000	1	103.000.000	1	103.000.000	1	103.000.000		
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1	1		1		1		1		1			
2.12.03.1.03.0001 - Pembinaan dan				47.000.000		47.000.000		47.000.000		47.000.000		47.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengawasan terkait Pencatatan Sipil														
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000		
2.12.03.1.03.0002 - Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil				56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	1	56.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				207.000.000		207.000.000		207.000.000		207.000.000		207.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	37.14	42.86	207.000.000	45.71	207.000.000	48.57	207.000.000	51.43	207.000.000	54.29	207.000.000	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	
2.12.04.1.01 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		
Persentase kab/kota yang mendapatkan supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04.1.01.0002 - Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota				31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		
Tersusunnya Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000		
2.12.04.1.02 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Jumlah PD Provinsi dan sektor lain yang memanfaatkan data dan dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1		1		1		1		1			
2.12.04.1.02.0005 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.12.04.1.02.0007 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Administrasi Kependudukan															
Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000			
2.12.04.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				111.000.000		111.000.000		111.000.000		111.000.000		111.000.000			
Persentase kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	111.000.000	1	111.000.000	1	111.000.000	1	111.000.000	1	111.000.000			
	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	28	28		28		28		28		28				
2.12.04.1.03.0001 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				47.000.000		47.000.000		47.000.000		47.000.000		47.000.000			
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000			
2.12.04.1.03.0002 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan				64.000.000		64.000.000		64.000.000		64.000.000		64.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pendayagunaan Data Kependudukan															
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	28	28	64.000.000	28	64.000.000	28	64.000.000	28	64.000.000	28	64.000.000			
<b>2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>				<b>67.500.000</b>		<b>67.500.000</b>		<b>67.500.000</b>		<b>67.500.000</b>		<b>67.500.000</b>			
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	67.500.000	100	67.500.000	100	67.500.000	100	67.500.000	54.29	67.500.000	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA		
2.12.05.1.01 - Penyediaan Profil Kependudukan				67.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000			
Jumlah Dokumen Penyediaan Profil dan Data Kependudukan Skala Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2	2	67.500.000	2	67.500.000	2	67.500.000	2	67.500.000	2	67.500.000			
	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1	1		1		1		1		1				
2.12.05.1.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Provinsi				33.500.000		33.500.000		33.500.000		33.500.000		33.500.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2	2	33.500.000	2	33.500.000	2	33.500.000	2	33.500.000	2	33.500.000		
2.12.05.1.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain				34.000.000		34.000.000		34.000.000		34.000.000		34.000.000		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000		
<b>2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>854.727.725</b>		<b>854.727.725</b>		<b>854.727.725</b>		<b>854.727.725</b>		<b>854.727.725</b>		
<b>2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				<b>41.686.425</b>		<b>41.686.425</b>		<b>41.686.425</b>		<b>41.686.425</b>		<b>41.686.425</b>		
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	32.2-34	29-32	41.686.425	28-30	41.686.425	27-29	41.686.425	26-28.5	41.686.425	25-28	41.686.425	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	
	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.18	2.14		2.14		2.13		2.13		2.12			
2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam				24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk															
Jumlah dokumen pengendalian penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	1	1	24.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.14.02.1.01.0007 - Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				24.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1	1	24.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.14.02.1.01.0020 - Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				0	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000			
Terwujudnya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur	0	0	0	1	24.500.000	1	24.500.000	1	24.500.000	1	24.500.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Formal, Nonformal dan Informal														
2.14.02.1.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi				17.186.425		17.186.425		17.186.425		17.186.425		17.186.425			
Jumlah dokumen pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	1	17.186.425	1	17.186.425	1	17.186.425	1	17.186.425	1	17.186.425			
2.14.02.1.02.0010 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				17.186.425		17.186.425		17.186.425		17.186.425		17.186.425			
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat provinsi (Termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter Pengendalian Penduduk dan KB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	1	17.186.425	1	17.186.425	1	17.186.425	1	17.186.425	1	17.186.425			
<b>2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>				<b>504.340.800</b>		<b>504.340.800</b>		<b>504.340.800</b>		<b>504.340.800</b>		<b>504.340.800</b>			
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	70.3	71.5	504.340.800	72.1	504.340.800	72.7	504.340.800	73.3	504.340.800	73.9	504.340.800	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8	7.5		7.5		7.5		7.5		7.5				
2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				448.840.800		448.840.800		448.840.800		448.840.800		448.840.800			
Jumlah dokumen KIE KKBPBPK	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	7	7	448.840.800	7	448.840.800	7	448.840.800	7	448.840.800	7	448.840.800			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	0	1		0		0		0		0				
	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	0	3		3		5		5		5				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1	1		1		1		1		1			
2.14.03.1.01.0007 - Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				89.000.000		0		0		0		0		0
Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	0	1	89.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.14.03.1.01.0009 - Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan				0		89.000.000		89.000.000		89.000.000		89.000.000		89.000.000
Terlaksananya Promosi Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	0	0	0	3	89.000.000	3	89.000.000	3	89.000.000	3	89.000.000		89.000.000
2.14.03.1.01.0010 - Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana				315.340.800		315.340.800		315.340.800		315.340.800		315.340.800		315.340.800
Terlaksananya fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	7	7	315.340.800	7	315.340.800	7	315.340.800	7	315.340.800	7	315.340.800		315.340.800

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
2.14.03.1.01.0012 - Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				44.500.000		44.500.000		44.500.000		44.500.000		44.500.000			
Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1	1	44.500.000	1	44.500.000	1	44.500.000	1	44.500.000	1	44.500.000			
2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				55.500.000		55.500.000		55.500.000		55.500.000		55.500.000			
Jumlah dokumen pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	32	32	55.500.000	32	55.500.000	32	55.500.000	32	55.500.000	32	55.500.000			
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0	20		20		20		20		20				
2.14.03.1.02.0004 - Pengembangan dan Penguatan Jejaring				55.500.000		55.500.000		55.500.000		55.500.000		55.500.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Kemitraan dalam Program Bangga Kencana															
Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000			
<b>2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				308.700.500		308.700.500		308.700.500		308.700.500		308.700.500			
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	50	52	308.700.500	53	308.700.500	54	308.700.500	55	308.700.500	56	308.700.500	2.08.2.12.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA		
2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				165.961.100		165.961.100		165.961.100		165.961.100		165.961.100			
Jumlah dokumen pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	50	50	165.961.100	50	165.961.100	50	165.961.100	50	165.961.100	50	165.961.100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	150	150		150		150		150		150			
2.14.04.1.01.0008 - Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB				70.961.100		70.961.100		70.961.100		70.961.100		70.961.100		
Terperuhnya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	150	150	70.961.100	150	70.961.100	150	70.961.100	150	70.961.100	150	70.961.100		
2.14.04.1.01.0016 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				44.500.000		44.500.000		44.500.000		44.500.000		44.500.000		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1	1	44.500.000	1	44.500.000	1	44.500.000	1	44.500.000	1	44.500.000		
2.14.04.1.01.0021 - Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				50.500.000		50.500.000		50.500.000		50.500.000		50.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	50	50	50.500.000	50	50.500.000	50	50.500.000	50	50.500.000	50	50.500.000		
2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				142.739.400		142.739.400		142.739.400		142.739.400		142.739.400		
Jumlah dokumen Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	50	50	142.739.400	50	142.739.400	50	142.739.400	50	142.739.400	50	142.739.400		
	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	7	7		7		7		7		7			
2.14.04.1.02.0006 - Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				110.239.400		110.239.400		110.239.400		110.239.400		110.239.400		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	7	7	110.239.400	7	110.239.400	7	110.239.400	7	110.239.400	7	110.239.400		
2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	50	50	32.500.000	50	32.500.000	50	32.500.000	50	32.500.000	50	32.500.000		
2.14.04.3.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				0		135.961.100		135.961.100		135.961.100		135.961.100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapat fasilitasi pembinaan di Kampung KB	0	0	0	60	135.961.100	90	135.961.100	90	135.961.100	120	135.961.100		
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	0	0		2		3		3		4			
2.14.04.3.01.0016 - Fasilitasi Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kampung KB				0		70.961.100		70.961.100		70.961.100		70.961.100		
Terlaksananya fasilitasi pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di kampung KB	Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapat fasilitasi pembinaan di Kampung KB	0	0	0	60	70.961.100	90	70.961.100	90	70.961.100	120	70.961.100		
2.14.04.3.01.0017 - Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang				0		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	0	0	0	2	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	4	65.000.000		

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini mengemukakan Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

**Tabel 2.9**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Dan Efisien Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Nilai Raport Kinerja Perangkat Daerah	74	80	90	91	92	93	94
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta	1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	1. 0,379 2. 65,38	1. 0,369 2. 66	1. 0,359 2. 67	1. 0,349 2. 68	1. 0,369 2. 69	1. 0,359 2. 70	1. 0,349 2. 71

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
Pemenuhan Hak Anak								
Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	95,38	95,5	96	96,5	97	97,5	98
Menurunnya Angka Kelahiran Total	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	66,4	66,7	67	68	69	70	71

## BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) DP3ACSKB Tahun 2025 – 2029 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025 – 2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DP3ACSKB tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Tahun 2005 - 2026. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DP3ACSKB tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan UPTD PPA pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, bidang-bidang dan UPTD PPA pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik,

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

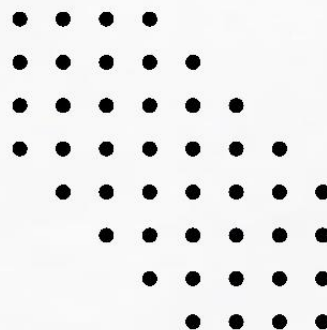
Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, 2025

**KEPALA DINAS**

**Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19660504 199512 1 002**

RENSTRA perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja, sekaligus sebagai bahan untuk melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah selama periode 5(lima) tahun periode renstra.



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung  
Jl. Pulau Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33149